



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026**

**KUALA PEMBUANG
2026**



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 304 /2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian pada rencana kerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Kabupaten Seruyan Tahun 2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 21).

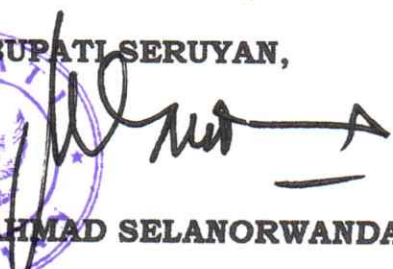
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026;
- KETIGA** : Sistematisa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB V : PENUTUP.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Juli 2025

 **BUPATI SERUYAN,**

AHMAD SELANORWANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 304 /2025
TANGGAL 29 Juli 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
8	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
21	Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
26	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan
28	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
30	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
32	Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan
33	Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan
34	Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
35	Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan
36	Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
37	Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
38	Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan
39	Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan



BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa karena atas petunjuk dan hidayahnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan ini disusun mengacu kepada Renstra Bapenda Tahun 2025-2029 untuk memenuhi kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang disusun berpedoman kepada RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2026 guna memastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, dan pagu indikatif sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKPD.

Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Dan kami menyadari penyusunan Renja tahun 2026 ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaannya.

Kuala Pembuang, Juli 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Seruyan



SUKARDI, SE
Pembina Tk.I/IV/b

NIP. 19710603 200501 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2024 dan Capaian Renstra Bapenda Bapenda kabupaten Seruyan.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.....	13
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi badan Pendapatan Daerah kabupaten Seruyan	39
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026.....	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	53
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA	54
3.1 Tujuan	54
3.2 Sasaran.....	56
3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA KABUPATEN SERUYAN	63
BAB V PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2025	10
Tabel 2. 2 Pengukuran Kinerja BAPENDA Kabupaten Seruyan Tahun 2024.....	30
Tabel 2. 3 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024	30
Tabel 2. 4 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024	31
Tabel 2. 5 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024	31
Tabel 2. 6 Nilai IKM BAPENDA Tahun 2024.....	32
Tabel 2. 7 Realisasi Anggaran sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.....	34
Tabel 2.8 Realisasi Anggaran (Akuntabilitas Keuangan) Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2024	36
Tabel 2. 9 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	41
Tabel 3. 1 Visi Misi III dan Misi V serta Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.....	55
Tabel 3. 2 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	56
Tabel 3. 3 Keterkaitan Visi, Misi dan Sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	58
Tabel 3. 4 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bapenda Tahun 2026.....	60
Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2025	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun perencanaan tahunan (1 tahun). Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada Perangkat Daerah rencana 5 (lima) tahunan disebut Renstra Perangkat Daerah dan rencana tahunan disebut Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (Renja BAPENDA) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BAPENDA baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Bapenda Tahun 2026 ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dan Renstra Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Merupakan acuan Perangkat Daerah dalam menyusun program kegiatan dan sub kegiatan dalam KUA dan PPAS serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2026 dan merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026, menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Bapenda Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Seruyan;
 8. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK.07/2010, Nomor : 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 67);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);
27. Peraturan Bupati Seruya Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;

28. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemungutan PBB P2;
29. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemungutan BPHTB;
30. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemungutan MBLB;
31. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
32. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembebasan BPHTB;
33. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
34. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pedoman Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
35. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemungutan dan Bentuk Sinergi Opsen MBLB;
36. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
37. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
38. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 21).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 ini adalah untuk memberikan arahan dan acuan dalam peraturan program dan kegiatan serta sub kegiatan Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda Kabupaten Seruyan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dijadikan Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2026 untuk melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Seruyan;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2026;
3. Sebagai pedoman dalam menilai pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya, untuk mengukur kinerja masing – masing bidang atau sub bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan;
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban dan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini terdiri dari 5 (Lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, Terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BAPENDA TAHUN LALU, memuat kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja Bapenda tahun lalu dan Perkiraan tahun 2026, capaian 2024, serta pencapaian target Renstra, memuat capaian kinerja pelayanan Bapenda, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA, terdiri dari Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja. Memuat telaahan terhadap kebijakan dan prioritas kebijakan nasional berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda, memuat tujuan dan sasaran berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi bapenda serta dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bapenda.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA, terdiri dari program, kegiatan, dan bub kegiatan.

BAB V. PENUTUP, memuat uraian tentang hal – hal yang perlu diperhatikan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2024 dan Capaian Renstra Bapenda Kabupaten Seruyan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sampai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan permasalahan yang dihadapi, mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah melaksanakan program dalam kegiatan, pencapaian-pencapaian target kinerja sebagai mana tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah.

Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2025

No.	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Reralisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											I		II		III		Triwulan I s/d IV														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=(14/9)*100	16											
			Program Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan Unit Kerja Pemerintah Daerah	46,437,393,000	11,520,706,628	14,982,029,853	1,193,124,387	3,853,146,949	-	-	3,473,887,592	14,994,594,220	3,110	BAPENDA																
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208,245,000	-	53,063,000	-	-	-	-	-	-	-	BAPENDA																
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	24	Dok	61,404,000	8	Dok	-	8	Dok	4,616,000	0	-	0	-	0	Dok	-	8	Dok	-	33.33	-	BAPENDA					
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA	6	Dok	23,442,000	2	Dok	-	2	Dok	7,814,000	0	-	0	-	0	Dok	-	2	Dok	-	33.33	-	BAPENDA					
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	6	Dok	23,442,000	2	Dok	-	2	Dok	7,814,000	0	-	0	-	0	Dok	-	2	Dok	-	33.33	-	BAPENDA					
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA	6	Dok	24,525,000	2	Dok	-	2	Dok	8,175,000	0	-	0	-	0	Dok	-	2	Dok	-	33.33	-	BAPENDA					
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	3	Dok	18,315,000	1	Dok	-	1	Dok	6,105,000	0	-	0	-	0	Dok	-	1	Dok	-	33.33	-	BAPENDA					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Capaian	9	Dok	23,967,000	3	Dok	-	3	Dok	7,989,000	0	-	0	-	0	Dok	-	3	Dok	-	33.33	-	BAPENDA					
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Dok	33,150,000	3	Dok	-	3	Dok	10,550,000	0	-	0	-	0	Dok	-	3	Dok	-	-	-	BAPENDA					
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	24,072,689,349	5,337,153,897	8,315,176,165	991,951,333	3,596,187,833	-	-	2,988,139,166	7,925,293,063	191.76	538.00	BAPENDA															
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frukuensi pembayaran gaji dan tunjangan	126	gaji dan tunjangan	23,978,222,349	26	gaji dan tunjangan	5,334,403,897	50	gaji dan tunjangan	8,288,699,565	40	org	991,951,333	40	org	3,596,187,833	0	org	-	40	gaji dan tunjangan	2,988,139,166	66	gaji dan tunjangan	7,922,543,063	52.38	33.04	BAPENDA
			Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPP/SPM yang diterbitkan	3	Dok	20,961,000	1	Dok	-	1	Dok	3,067,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	Dok	-	33.33	-	BAPENDA				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	3	Dok	14,910,000	1	Dok	-	1	Dok	4,961,600	0	-	0	-	0	-	0	-	1	Dok	-	33.33	-	BAPENDA				
			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan dan Pemeriksaan	6	Dok	24,000,000	2	Dok	-	2	Dok	7,170,000	0	-	0	-	0	-	0	-	2	Dok	-	33.33	11.46	BAPENDA				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri Wulan/Semesteran/SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan semesteran	26	Dok	16,410,000	9	Dok	-	9	Dok	5,392,000	0	-	0	-	0	-	0	-	9	Dok	-	34.62	-	BAPENDA				
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	21	Dok	18,186,000	1	Dok	-	10	Dok	5,886,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	Dok	-	4.76	-	BAPENDA				
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat	Persentase Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	59,934,000	940,000	19,925,500	-	-	-	-	-	940,000	493.50	BAPENDA																
			Menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	terlaksananya Rencana Kebutuhan Barang Perangkat Daerah	3	Dok	15,000,000	1	Dok	-	1	Dok	5,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	33.33	-	BAPENDA					
			Pengamanan Barang Milik Daerah	kodekasi dan inventaris barang	9	jenis	14,940,000	3	jenis	-	3	jenis	4,927,500	0	-	0	-	0	-	0	-	3	-	33.33	-	BAPENDA					
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	dukumen administrasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah	3	Laporan	14,994,000	1	Laporan	-	1	Laporan	4,998,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	33.33	-	BAPENDA					
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya Laporan Rekonsiliasi barang	3	Dok	15,000,000	1	Dok	-	1	Dok	5,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	33.33	5.60	BAPENDA					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang terlaksana	1,933,742,000	255,907,030	233,376,700	-	-	-	-	-	255,907,030	453.45	BAPENDA																
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut yang diadakan	240	stel	496,500,000	80	stel	171,042,700	80	stel	104,724,700	0	-	0	0	stel	0	0	stel	-	80	stel	171,042,700	33.33	34.45	BAPENDA			
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Data dan laporan Pengelolaan Administrasi Pegawai	3	Dok	17,710,000	1	Dok	-	1	Dok	4,393,000	0	-	0	0	0	0	0	-	1	-	33.33	-	BAPENDA					

			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan SKP pegawai	8	Dok	14,994,000	2	Dok	-	2	Dok	4,918,000	0		0		0		0		0		0		-	2		-	33.33	-	BAPENDA
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	18	Orang	438,063,000	6	Orang	-	6	Orang	51,663,000	0		0		0		0		0	orang	-	6	orang		-		33.33	-	BAPENDA
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Birek	30	Orang	966,475,000	10	Orang	94,864,330	10	Orang	67,680,000	0	org	0		0	org	0		0	orang	-	10	orang	94,864,330		33.33	8.78	BAPENDA	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			3,125,403,200			3,083,935,694			1,152,949,450	97,123,232		38,845,639		-		-				115,968,871				1,199,904,565	312.08		BAPENDA	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik(Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45	Jenis	84,095,000	15	Jenis	35,124,000	15	Jenis	20,911,200	0	-	5	Jenis	7,780,750	Jenis		0	5	Jenis	7,780,750	20	Jenis	82,904,750	44.44	86.14	BAPENDA		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	168	Jenis	488,025,600	56	Jenis	185,642,656	56	Jenis	136,647,750	0	-			Jenis		0	0	Jenis	-	56	Paket	185,642,656	33.33	36.04	BAPENDA			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30	Jenis	40,450,000	10	Jenis	25,628,600	10	Jenis	16,854,000	0	-	3	Jenis	7,076,500	Jenis		0	3	Jenis	7,076,500	13	Jenis	32,705,100	43.33	54.10	BAPENDA		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Logistik Kantor yang disediakan	15	Jenis	457,327,500	5	Jenis	84,205,800	5	Jenis	157,289,000	1	4,140,000	2	Jenis	13,030,000	Jenis		0	3	Jenis	17,170,000	8	Jenis	111,375,800	53.33	24.35	BAPENDA		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	30	Jenis	457,483,100	20	Jenis	35,259,200	20	Jenis	269,164,500	1	2,200,000	3	Jenis	15,050,000	Jenis		0	4	Jenis	17,250,000	24	Jenis	82,509,200	40.00	18.04	BAPENDA		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan	9	Media	23,022,000	3	Media	3,340,000	3	Media	7,680,000	0	-	3	Media	1,560,000	Media		0	3	Jenis/med a	1,560,000	6	Jenis/m edia	7,800,000	66.67	33.88	BAPENDA		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	230	Laporan	1,575,000,000	75	Laporan	351,835,438	75	Laporan	524,403,000	20	Laporan	50,783,232	5	Laporan	24,348,389	Laporan		0	25	Keg	65,131,621	100	keg	716,967,059	43.48	45.52	BAPENDA	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah				2,130,375,633			3,329,646,650			1,203,584,917	0	-	0	-	0	-	0	-					-		3,329,646,650	1,075.19		BAPENDA	
			Pengadaan Mebel	Jumlah jenis Mebel yang disediakan	20	Jenis	234,041,500	5	Jenis	93,412,050	10	Jenis	21,644,000	0	-	0	-			0	0		-	5		93,412,050	25.00	39.91	BAPENDA			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	18	Jenis	1,716,334,133	10	Jenis	386,449,800	4	Jenis	614,296,000	0	-	0	-	Jenis		0	0		-	10		386,449,800	55.56	40.00	BAPENDA			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	2	Unit	120,000,000	0	Unit	268,849,500	1	Unit	-	0	-	0	-	Unit		0	0		-	0		268,849,500	-	224.04	BAPENDA			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1	Unit	60,000,000	1	Unit	280,935,300	0	Unit	-	0	-	0	-	Unit		0	0		-	1		280,935,300	100.00	468.23	BAPENDA			
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-				567,644,917							0		-			-		-		-		BAPENDA	
			Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Usaha Pemerintah Daerah yang tersedia			3,707,666,368			885,411,996			1,077,532,421	0	137,774,822	0	160,418,602	0	-	0	-	0		296,193,424	0		3,183,605,420	238.16		BAPENDA		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat, materi dan jasa pengiriman	3	Dok	44,330,000	1	Dok	22,000,000	1	Dok	14,530,000	1	3,300,000	1	1,450,000		dok	0	2	dok	6,750,000	3	Lap	28,750,000	100.00	64.85	BAPENDA			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening Listrik, Telepon, PDAM, Koneksi Internet dan Jasa Sambungan TV Kabel	9	Laporan	880,215,618	3	Laporan	104,367,334	3	Laporan	165,274,729	2	17,144,642	2	21,795,722		jenis	0	4	bulan	36,940,364	7	bulan	143,307,698	77.78	21.07	BAPENDA			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dan Jenis Jasa Administrasi Keuangan yang dibayarkan	3	Laporan	2,983,120,750	1	Laporan	759,044,662	11	Laporan	897,727,692	1	Laporan	117,330,180	1	335,172,880	Laporan		0	2	Jenis	252,503,060	3	Jenis	1,011,547,722	100.00	33.91	BAPENDA		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Pemerintah Daerah yang terpelihara dengan baik			11,199,337,450			2,627,811,361			2,926,419,700	6,275,000		37,694,875		-		-			471,586,131	0			3,099,397,492			BAPENDA		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31	Unit	392,347,500	17	Unit	207,450,150	17	Unit	216,650,000	0	6,400,000	12	Unit	37,694,875	Unit		0	12	unit	43,094,875	29	unit	250,545,025	56.86	42.30	BAPENDA		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	15	jenis	159,588,000	5	jenis	46,556,720	5	jenis	39,450,000	0	875,000			Jenis		0	Jenis	875,000	5	Jenis	17,431,720	33.33	29.72	BAPENDA				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	296,531,250	1	Unit	137,330,500	1	Unit	33,750,000	0		-	Unit		Unit		0	0		-	1		137,330,500	33.33	46.31	BAPENDA		
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen			10,150,870,700			2,236,473,991			2,636,568,700	278,253,766		148,362,490		-		-			427,616,256					2,664,090,247			BAPENDA	
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				10,150,870,700			2,236,473,991			2,636,568,700	278,253,766		148,362,490		-		-			427,616,256					2,664,090,247			BAPENDA	

			Sub Kegiatan Pemencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3	Dok	1,046,573,500	1	Dok	312,156,505	1	Dok	247,727,500	1	Dok	30,527,006	1	Dok	24,710,500		Dok		0				2	Dok	36,237,506	3	Dok	267,394,011	100.00	25.55	BAPENDA
			Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8	Dok	759,880,000	8	Dok	249,205,952	1	Dok	204,041,500	6	Dok	10,101,700	2	Dok	16,876,000		Dok		0				8	Dok	36,977,700	14	Dok	276,183,652	175.00	23.19	BAPENDA
			Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3	Laporan	630,466,000	1	Laporan	187,634,600	1	Laporan	170,785,000	1	Laporan	12,609,000	1	Laporan	8,584,000	Laporan			0				2	Laporan	21,193,000	3	Laporan	206,827,600	100.00	33.12	BAPENDA
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11	Unit	766,544,500	9	Unit	449,987,438	4	Unit	237,681,500	0	Unit					Unit			0				0	unit	-	6	unit	449,987,438	54.55	38.70	BAPENDA
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3	Laporan	1,048,842,100	1	Laporan	382,929,388	1	Laporan	154,689,500	1	Laporan	20,325,200	Laporan		Laporan				0				1	Dok	20,325,200	2	Dok	203,254,588	66.67	39.38	BAPENDA
			Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	Laporan	542,320,000	1	Laporan	74,382,345	1	Laporan	149,202,000	0.5	Laporan	31,246,500	0.5	Laporan	43,061,750	Laporan			0				1	Laporan	74,308,290	2	Laporan	146,690,635	66.67	27.42	BAPENDA
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disevaluasi NJOP nya	0	Laporan	414,574,000	2	Laporan	61,401,300	2	Laporan	103,217,000	2	Laporan (obyek Pajak)	10,922,400	Laporan (obyek Pajak)		Laporan (obyek Pajak)				0				2	Dok	10,922,400	4	Dok	72,323,700	66.67	17.45	BAPENDA
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3	Dok	712,540,000	3	Dok	189,682,413	3	Dok	207,950,000	3	Dok	128,100,660		Dok		Dok			0				3	Dok	128,100,660	6	Dok	317,783,073	66.67	44.60	BAPENDA
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3	Dok	667,100,500	1	Dok	189,033,869	1	Dok	218,878,000	0.5	Dok (Layanan)	21,383,000	0.5	Dok (Layanan)	18,920,000	Dok (Layanan)			0				1	Dok	40,303,000	2	Dok	229,336,869	66.67	34.38	BAPENDA
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	27	Dok	461,709,000	9	Dok	73,340,625	9	Dok	150,867,000	3	Dok	6,724,400	3	Dok	7,908,000	Dok			0				6	Dok	13,632,400	15	Dok	86,973,025	55.56	13.14	BAPENDA
			Pemagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemagihan Pajak Daerah	975	Dok	726,776,000	350	Dok	152,211,177	325	Dok	220,947,000	100	Dok	3,450,800	50	Dok	26,066,200	Dok			0				150	stpd	29,517,000	500	stpd	181,728,177	51.28	25.00	BAPENDA
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	150	Dok	702,441,100	50	Dok	78,814,573	50	Dok	130,023,700	0	Dok		10	Dok	3,236,000	Dok			0				10	berkas	3,236,000	60	berkas	82,050,573	40.00	11.68	BAPENDA
			Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak	24	Dok	950,804,000	9	Dok	265,146,612	7	Dok	171,424,000	0	Dok			Dok		Dok			0				0	dok	-	5	dok	105,146,612	20.83	19.09	BAPENDA
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	36	Dok	636,300,000	12	Dok	117,209,266	12	Dok	225,100,000	2	Laporan (Dok)	3,863,100	Laporan (Dok)		Laporan (Dok)				0				2	dok	3,863,100	14	dok	121,072,366	38.89	14.49	BAPENDA
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3	Dok	65,000,000	1	Dok	13,337,928	1	Dok	44,036,000	0	Dok				Dok				0				0	dok	-	1	dok	13,337,928	33.33	15.69	BAPENDA
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														3.3		1,471,378,153	3.09		2,002,509,439	0		-	0		-	97.82		3,901,563,848	20.20		14,994,594,220	50.78	30.48		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang keuangan daerah dibidang pendapatan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Penyelenggaraan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan saat ini adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan pearngkat daerah dan sesuai dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 54 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;

11. Penagihan Pajak Daerah;
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; dan
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.
15. Elektrontifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

B. SUSUNAN ORGANISASI

Adapun unsur-unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah; dan
 - b. Penyusunan Kebijakan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah.
4. Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak terdiri dari:
 - a. Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah; dan
 - b. Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah.
5. Bidang Penagihan, Pengawasan Dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan terdiri dari:
 - a. Subbidang Penagihan Pajak Daerah; dan
 - b. Subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
6. Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Subbidang Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
 - b. Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah.
7. Kelompok Jabatan.

1. KEPALA BADAN

- A. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Bidang Pendapatan Daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan.
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan Bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;
 - d. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. SEKRETARIS

- A. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- B. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Badan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan.
- C. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
 - b. Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;

- c. Pengoordinasian administrasi keuangan dinas;
- d. Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah dinas;
- e. Pengoordinasian Administrasi Kepegawaian dinas;
- f. Pengoordinasian Administrasi Umum dinas;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
- h. Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan dinas;
- i. Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
- j. Pengoordinasian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas
- k. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretaris membawahi:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b) Melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan;
- c) Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Badan;

- d) Melaksanakan pengoordinasian dan Menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Badan;
- e) Melaksanakan pengoordinasian dan Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- f) Menyiapkan bahan evaluasi kinerja Badan;
- g) Melaksanakan Administrasi Keuangan Badan;
- h) Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b) Melaksanakan Administrasi Umum Badan;
- c) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Badan;
- d) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Badan;
- e) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Badan;
- f) Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;
- g) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. BIDANG PERENCANAAN, PELAYANAN DAN KERJASAMA PENDAPATAN DAERAH

Bidang Perencanaan, Pelayanan, dan Penyuluhan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Bidang Perencanaan, Pelayanan, dan Penyuluhan Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan badan pada bidang yang meliputi perencanaan pengelolaan, penyusunan kebijakan, pelayanan dan penyuluhan pendapatan daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Kerjasama Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pengelolaan, penyusunan kebijakan, pelayanan dan penyuluhan pendapatan daerah;
- b. Pengordinasian perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- c. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan dan konsultasi pajak Daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
- f. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Kerjasama Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Subbidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah; dan
2. Subbidang Penyusunan Kebijakan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah.

1. Subbidang Perencanaan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah

Subbidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Perencanaan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- b. Melakukan pengkajian potensi pajak daerah;
- c. Melaksanakan dan fasilitasi kegiatan kerjasama dalam rangka pendapatan daerah
- d. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- f. Melaksanakan pelayanan satu pintu penerimaan dan pendistribusian berkas;
- g. Melaksanakan pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
- h. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. BIDANG PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH

Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan

Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada bidang yang meliputi Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian, Pendapatan Pajak Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pajak daerah
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian pajak daerah;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan

basis data pajak daerah

- f. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

Bidang Pendataan, Penilaian dan penetapan Pendapatan pajak Daerah terdiri dari:

1. Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah; dan
2. Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah.

1. Subbidang Pendataan Dan Penilaian Pajak Daerah

Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Kepala Sub Bidang dan Penyusunan Produk Hukum Perpajakan dan Retribusi Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah;
- b. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak;
- c. Melakukan fasilitasi pencetakan Kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);
- d. Melaksanakan verifikasi objek pajak;
- e. Melaksanakan Penilaian Pajak Daerah;
- f. Melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data;
- g. Melaksanakan penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- h. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbidang Pengolahan Data Dan Penetapan Pajak Daerah

Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah

dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Bidang Penilaian, Penetapan dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan Pajak Daerah;
- b. Melaksanakan Perhitungan dan penetapan secara jabatan pajak daerah serta penerbitan SKPD;
- c. Melaksanakan penetapan SKPD;
- d. Melaksanakan perhimpunan dan penyajian data hasil penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan pendistribusian SPPT PBB-P2;
- f. Melaksanakan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah;
- g. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

5. BIDANG PENAGIHAN, PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PEMUNGUTAN

Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan mempunyai tugas mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan badan pada bidang yang meliputi penagihan, pengendalian, pemeriksaan, pengawasan dan penyelesaian keberatan pemungutan pajak daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian keberatan pemungutan mempunyai tugas:

- a. Penagihan, pengawasan dan penyelesaian keberatan pemungutan pajak daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian, pemeriksaan, pengawasan pajak daerah;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelesaian keberatan pemungutan pajak daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelesaian data piutang pajak daerah;
- f. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Penagihan, Pengawasan dan penyelesaian keberatan pemungutan terdiri dari:

1. Subbidang Penagihan Pajak Daerah; dan
2. Subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.

1. Subbidang Penagihan Pajak Daerah

Subbidang Penagihan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Penagihan pajak daerah mempunyai tugas:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbidang Penagihan Pajak Daerah;
- b. Merancang dan menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan teknis sub bidang Penagihan Pajak Daerah;
- c. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah;
- d. Melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengarsipan dokumen pada sub bidang penagihan pajak daerah;
- e. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi terkait penagihan, penyelesaian data piutang dan kadaluwarsa penagihan pajak

- daerah;
- f. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

2. Subbidang Pengawasan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pemungutan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Pengawasandan Penetapan dan penyelesaian keberatan pajak daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- b. Merancang dan menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan teknis Subbidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- c. Melaksanakan kegiatan pengendalian, pemeriksaan, pengawasan pajak daerah;
- d. Melaksanakan kegiatan penyelesaian keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan dan pembebasan pajak daerah.
- e. Melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengarsipan dokumen pada sub bidang pengawasan dan penyelesaian keberatan pajak daerah;
- f. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi terkait pengendalian, pemeriksaan, pengawasan dan penyelesaian keberatan pajak daerah;

- g. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

6. BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada Bidang yang meliputi monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Sub Bidang evaluasi dan pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Perumusan kebijakan teknis monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pendapatan daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
- f. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

Bidang Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah terdiri atas:

- 1. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
- 2. Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah.

1. Subbidang Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala subBidang monitoring, dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- b. Melaksanakan kegiatan, monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerimaan Pendapatan Daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan penilaian dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah

Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Kepala Sub Bidang pelaporan pendapatan daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Pelaporan Pendapatan Daerah;
- b. Melakukan penghimpunan, penyusunan dan penyajian laporan pendapatan daerah;
- c. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan terkait tata kelola data pelaporan

- penerimaan pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
 - f. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
 - g. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendapatan daerah;
 - h. Melaksanakan penilaian dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang di perintahkan oleh pimpinan.

7. KEPEGAWAIAN DAN ESELON

1. Pejabat Aparatur Sipil Negara yang ada pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Badan merupakan Pejabat Struktural Eselon II.b atau Jabatan Tinggi Pratama.
3. Sekretaris merupakan Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
4. Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
5. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
6. Jabatan Fungsional Tertentu merupakan jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Pelaksana merupakan Aparatur Sipil Negara selain Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.

8. KELOMPOK JABATAN

A. Jabatan Fungsional

1. Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat menetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing masing.
2. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas.
3. Penetapan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai uraian tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah.
7. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing- masing.

B. Jabatan Pelaksana

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam jabatan Pelaksana.
2. Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah
3. Nama-nama jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

5. Penetapan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan setiap awal tahun anggaran dengan mengacu pada Peta Jabatan Perangkat Daerah.

9. TATA KERJA

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tersebut lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
6. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
7. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapaian hasil organisasi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi termasuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan sebagai salah satu perangkat Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam pengukuran-pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran disertai dengan indikator kinerja dan indikator sasaran.

Penilaian Kinerja pada BAPENDA Kabupaten Seruyan dilakukan untuk mengevaluasi dan menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Penilaian kinerja pada Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2024 mengacu pada Perjanjian Kinerja Bapenda Tahun 2024. Tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat dari indikator kinerja. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Seruyan Tahun 2024 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. fokus dengan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Hasil capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2 Pengukuran Kinerja BAPENDA Kabupaten Seruyan Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	target indikator kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian
1	2	5	4	6		
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah Melalui Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang transparan dan Akuntabel		Derajat Fiskal Otonomi Daerah	6,58	5,54	84,19%
		Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	40	0,05	12,50%
		Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional	IKM terhadap pelayanan pajak daerah	80	80,00	100 %
		Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	-	-

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2024 terlihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pendapatan Daerah (PD) (Rp)	Kontribusi PAD terhadap PD (%)
1	2	3	4
2024	75.426.432.626,20	1.360.282.269.422,20	5,54

Rasio tersebut menjelaskan tentang derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD), semakin tinggi kontribusi PAD semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi di pemerintahan.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun 2018-2024 sebagaimana pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024

Tahun	Realisasi PAD (RP)	Pertumbuhan per Tahun (%)
1	2	3
2023	71.958.279.810,29	
2024	75.426.432.626,20	4,82

Sumber Data: Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan. Peertumbuhan PAD Kabupaten Seruyan Tahun 2024 sebesar 4,82 % .

Dengan Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Seruyan tahun 2024 yang hanya sebesar 4,82 % diklasifikasikan **Belum Mandiri**.

Artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan belum mampu untuk membiayai secara mandiri pembangunan daerah dan seyogyanya bahwa sebagian besar belanja pemerintah daerah Kabupaten Seruyan masih tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Sedangkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2. 5 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

TAHUN	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2024	PENDAPATAN DAERAH	1.441.916.718.482,40	1.360.282.269.422,20	94,34
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	141.612.984.053,00	75.426.432.626,20	53,26
	PENDAPATAN TRANSFER	1.300.303.734.429,40	1.284.855.836.796,00	98,81
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00

Sumber Data: Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah

IKM terhadap pelayanan pajak daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik. Melalui hasil survey ini, diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2. 6 Nilai IKM BAPENDA Tahun 2024

IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	
Nilai IKM (point)	Tahun 2024
	85,00

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah hasil dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan rutin dilaksanakan setiap tahun dengan melakukan kuisisioner terhadap Wajib Pajak yang mendapatkan pelayanan Pajak Daerah.

Dalam penghitungan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dilaksanakan melalui survey kepada pemohon penerima pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, responden yang ditemui adalah wajib pajak yang secara langsung merasakan pelayanan. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan.

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pajak daerah realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 85,00 berdasarkan Kategorisasi Mutu Pelayanan maka mutu pelayanan Pajak daerah dan Restribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Kinerja **B (BAIK)**.

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan salah satu instrument dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Dalam pelaksanaan kinerja pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan Prioritas yang diampu oleh semua Bidang ini berarti bahwa semua bidang pada Bapenda Kabupaten Seruyan mempunyai peran dan berkontribusi dalam keberhasilan atau kegagalan tingkat capaian kinerja perangkat daerah.

Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian sasaran strategis suatu organisasi tidak lepas dari pemanfaatan sumber daya yang ada terutama sumber daya keuangan. Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan memiliki anggaran sebesar Rp. 15.062.758.000,00 (Lima Belas Miliar Enam Puluh Dua Juta Tujuh ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) digunakan untuk melaksanakan 2 jenis program, 9 kegiatan dan 54 sub kegiatan. 1 (satu) program dan 8 (delapan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan merupakan urusan penunjang yang dilaksanakan oleh kesekretariatan dan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan merupakan urusan keuangan yang dilaksanakan oleh semua bidang.

Realisasi penggunaan sumber daya keuangan atas capaian kinerja sasaran (kinerja utama) adalah sebagaimana pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2. 7 Realisasi Anggaran sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator kinerja sasaran	Program	Indikator kinerja program	Kegiatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD Sebesar: 4,82 %	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pendapatan Daerah sebesar: 75,46%	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.963.699.700	2.236.473.991
2	Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	IKM terhadap pelayanan pajak daerah sebesar:85%					
3	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme aparatur	Nilai Sakip Perangkat Daerah sebesar: -	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Unit Kerja yang memperoleh penunjang urusan pemerintah daerah Sebesar 76,74%		12.099.058.300	9.284.232.637
TOTAL				76,48%		15.062.758.000,00	11.520.706.628,00

Hasil capaian kinerja atas pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang terealisasi sebesar Rp. 11.520.706.620,00 (Sebelas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah Sepuluh Rupiah) atau terserap 76,48%. Dengan demikian dikaitkan dengan pencapaian target-target kinerja sasaran (IKU) Badan Pendapatan Daerah tahun 2024, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 bisa dikatakan ***Cukup Efektif***.

Realisasi anggaran (akuntabilitas keuangan) pada bapenda Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2023 secara keseluruhan adalah sebagaimana pada tabel 3,18 berikut:

Tabel 2. 8 Realisasi Anggaran (Akuntabilitas Keuangan) Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	14.590.668.221,00	11.700.826.890,00	80,19%
			KEUANGAN	14.590.668.221,00	11.700.826.890,00	80,19%
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme aparatur	Nilai sakiP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.099.058.300	9.284.232.637	76,74
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.364.650	-	-
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.358.000		-
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.074.000		-
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.654.000		-
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.655.000		-
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.545.000		-
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.339.650		-
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.347.460.437	5.337.153.897	72,64
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.319.880.837	5.334.403.897	72,88
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.984.000	-	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.071.600		-
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.000.000	2.750.000	34,38
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.462.000		-
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.062.000		-
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.728.700	840.000	4,05
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-	-
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.340.700	-	-
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.988.000	-	-

			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.400.000	840.000	15,56
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	382.209.200	255.907.030	66,95
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	186.535.200	171.042.700	91,69
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.970.000	-	-
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.998.000	-	-
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	185.706.000	84.864.330	45,70
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.159.050.772	1.083.935.694	93,52
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.145.100	55.124.000	79,72
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.288.100	185.642.656	98,07
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.868.450	25.628.600	65,94
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.695.050	94.205.800	82,14
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86.199.400	65.259.200	75,71
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.662.000	6.240.000	81,44
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	653.192.672	651.835.438	99,79
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.491.222.004	1.329.646.650	89,16
			Pengadaan Mebel	94.000.000	93.412.050	99,37
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	816.000.300	686.449.800	84,12
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	299.055.304	268.849.500	89,90
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	282.166.400	280.935.300	99,56
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.093.608.176	885.411.996	80,96
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.300.000	22.000.000	98,65
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.711.160	104.367.334	54,73
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	880.597.016	759.044.662	86,20
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540.414.361	391.337.370	72,41
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.870.000	207.450.150	82,69

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.270.000	46.556.720	96,45
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	241.274.361	137.330.500	56,92
2.	1.Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah 2.Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Standar Pelayanan Publik	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah IKM terhadap pelayanan pajak daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.963.699.700	2.236.473.991	75,46
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.963.699.700	2.236.473.991	75,46
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	268.637.500	212.156.505	78,98
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	207.460.000	149.205.952	71,92
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	225.469.000	187.634.600	83,22
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	467.115.250	449.987.438	96,33
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	251.580.500	182.929.388	72,71
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	147.440.000	74.382.345	50,45
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	104.858.000	61.401.300	58,56
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	204.180.000	189.682.413	92,90
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	205.216.500	189.033.869	92,11
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	172.969.250	73.340.625	42,40
			Penagihan Pajak Daerah	180.592.000	152.211.177	84,28
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	160.813.700	78.814.573	49,01
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	140.268.000	105.146.612	74,96
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	172.100.000	117.209.266	68,11
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	55.000.000	13.337.928	24,25

Sumber: Bendahara Pengeluaran BAPENDA Kabupaten Seruyan

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi badan Pendapatan Daerah kabupaten Seruyan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan khususnya dalam mendukung agenda pembangunan dan menunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan Bapenda Kabupaten Seruyan dihadapkan pada beberapa permasalahan yang berdampak terhadap pelayanan dan kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan target pendapatan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan realisasi pendapatan, Realisasi dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah

Isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, antara lain:

1. Realisasi PAD belum optimal, mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta Restribusi Daerah;
2. Adanya tunggakan pajak daerah
3. Perbaikan mekanisme pendataan potensi Pendapatan Daerah;
4. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah dan melakukan revitalisasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Daerah;
5. Memperluas kerja sama dengan perbankan guna memberikan kemudahan akses pembayaran pajak;
6. Penerapan SOP dan mutu pelayanan demi kepuasan masyarakat sebagai objek dari pengelolaan pendapatan daerah;
7. Meningkatkan koordinasi antara unit/badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan.
9. Meningkatkan inovasi dalam sistem digitalisasi pajak daerah dengan pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile;
10. Peningkatan koordinasi antara unit/badan pengelola pajak dan retribusi daerah;
11. Meningkatkan kualitas, disiplin dan kinerja SDM;
12. Meningkatkan daya dukung sarana prasarana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun rencana kebutuhan pembangunan daerah. Dengan membandingkan antara rencana pembangunan tersebut dengan kemampuan yang dimiliki maka perlu dilakukan seleksi Rancangan awal RKPD guna menentukan skala prioritas dengan menganalisis kebutuhan atas program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Review Terhadap rancangan Awal RKPD terhadap atas kebutuhan atas program, kegiatan dan sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Seruyan disajikan pada Tabel 2.9 berikut:

Tabel 2. 9 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
						(Rp)						(Rp)
	BADAN PENDAPATAN DAERAH					16.213.474.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH					15.673.354.282,00
	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					16.213.474.000,00	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					15.673.354.282,00
	KEUANGAN					16.213.474.000,00	KEUANGAN					15.673.354.282,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.551.517.300,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.011.397.582,00
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				69.680.300,00	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				63.538.000,00
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	20.349.000,00	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	18.578.000,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.814.000,00	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.220.000,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	7.814.000,00	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	7.220.000,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.175.000,00	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000,00

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
						(Rp)						(Rp)
	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.514.300,00	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.410.000,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.989.000,00	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.260.000,00
	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	11.025.000,00	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.350.000,00
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.121.533.243,00	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.121.533.375,00
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kuala Pembuang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	8.090.154.243,00	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kuala Pembuang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	8.090.154.375,00

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
						(Rp)						(Rp)
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	6.984.000,00	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	6.984.000,00
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.970.000,00	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.970.000,00
	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	7.898.000,00	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	7.898.000,00

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
						(Rp)						(Rp)
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen Laporan	5.465.000,00	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen Laporan	5.465.000,00
	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.062.000,00	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.062.000,00
	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				19.978.000,00		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				16.712.000,00
	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.796.000,00
	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	4.980.000,00	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	4.980.000,00

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
						(Rp)						(Rp)
	-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.998.000,00	-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.836.000,00
	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.100.000,00
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				650.362.800,00	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				622.668.800,00
	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kuala Pembuang	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	168.899.800,00	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kuala Pembuang	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	168.899.800,00
	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6.370.000,00	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.692.000,00
	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	4.998.000,00	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	4.982.000,00

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
						(Rp)						(Rp)
		- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kuala Pembuang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	142.961.000,00		- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kuala Pembuang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	142.961.000,00
		- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kuala Pembuang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	327.134.000,00		- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kuala Pembuang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	301.134.000,00
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.065.513.501,00	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.070.499.951,00
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kuala Pembuang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	21.360.200,00		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kuala Pembuang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	21.360.200,00
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kuala Pembuang	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	178.523.950,00		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kuala Pembuang	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	178.523.950,00
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kuala Pembuang	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	23.034.300,00		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kuala Pembuang	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	23.034.300,00

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
						(Rp)						(Rp)
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kuala Pembuang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	154.903.000,00	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kuala Pembuang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	154.903.000,00
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kuala Pembuang	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	153.341.050,00	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kuala Pembuang	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	158.327.500,00
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	7.680.001,00	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	7.680.001,00
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	526.671.000,00	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	526.671.000,00
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.212.845.000,00	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				721.641.000,00
	-	Pengadaan Mebel	Kuala Pembuang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Jenis Unit	112.524.300,00	-	Pengadaan Mebel	Kuala Pembuang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Jenis Unit	50.244.000,00
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kuala Pembuang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	599.223.600,00	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kuala Pembuang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	493.226.400,00

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
						(Rp)						(Rp)
	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kuala Pembuang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	356.341.200,00	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kuala Pembuang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	178.170.600,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kuala Pembuang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	144.755.900,00	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kuala Pembuang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	1.109.147.956,00	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	1.092.947.956,00
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 DokumenLaporan	15.015.000,00	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 DokumenLaporan	15.015.000,00
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Jenis Laporan	273.274.668,00	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Jenis Laporan	257.074.668,00

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
						(Rp)						(Rp)
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Dokumen Laporan	820.858.288,00	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Dokumen Laporan	820.858.288,00
-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				302.456.500,00	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				301.856.500,00
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kuala Pembuang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	187.830.000,00	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kuala Pembuang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	187.830.000,00
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kuala Pembuang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	53.850.000,00	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kuala Pembuang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	53.250.000,00
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kuala Pembuang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	60.776.500,00	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kuala Pembuang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	60.776.500,00

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
						(Rp)						(Rp)
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.661.956.700,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.661.956.700,00
	-	Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.661.956.700,00	-	Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.661.956.700,00
	-	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	365.524.500,00	-	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	365.524.500,00
	-	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	269.960.000,00	-	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	269.960.000,00
	-	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	226.822.000,00	-	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	226.822.000,00
	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	277.181.500,00	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	277.181.500,00

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan		Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
						(Rp)						(Rp)
	-	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	366.280.500,00	-	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	366.280.500,00
	-	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	197.440.000,00	-	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	197.440.000,00
	-	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kuala Pembuang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	43000 Obyek Pajak	154.858.000	-	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kuala Pembuang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	43000 Obyek Pajak	154.858.000,00
	-	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	254.180.000,00	-	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	254.180.000,00
	-	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	249.033.500,00	-	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	249.033.500,00
	-	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	9 Dokumen	243.903.000,00	-	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kuala Pembuang	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	9 Dokumen	243.903.000,00

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan			Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan			Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
														(Rp)
		-	Penagihan Pajak Daerah	Kuala Pempuang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	300 Dokumen	265.592.000,00		-	Penagihan Pajak Daerah	Kuala Pempuang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	300 Dokumen	265.592.000,00
		-	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kuala Pempuang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50 Dokumen	255.813.700,00		-	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kuala Pempuang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50 Dokumen	255.813.700,00
		-	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kuala Pempuang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	205.268.000,00		-	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kuala Pempuang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	205.268.000,00
		-	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kuala Pempuang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	300.100.000,00		-	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kuala Pempuang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	300.100.000,00
		-	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kuala Pempuang	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	30.000.000,00		-	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kuala Pempuang	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	30.000.000,00
Total Anggaran Bapenda							16.213.474.000,00	Total Anggaran Bapenda						15.673.354.282,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan mempunyai tugas kewenangan dibidang pendapatan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan pada dasarnya adalah membantu Bupati Seruyan dalam Penyelenggaraan Pemerintah di bidang pendapatan.

Pada tahun 2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan tidak memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosisasi-asosiasi maupun perguruan tinggi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA

3.1 Tujuan

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Seruyan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Bapenda tahun 2025-2029 harus menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan pernyataan visi dan misi Kepala Daerah.

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda adalah sebagaimana pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Visi Misi III dan Misi V serta Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Visi	TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU, DAN AMANAH UNTUK SEMUA									
MISI III	MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN, KEMANDIRIAN DESA DAN INOVASI LAYANAN PUBLIK									
TUJUAN	TERWUJUDNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH, KEMANDIRIAN DESA, DAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS, TRANSPARAN, INOVATIF, KAPABEL DAN AKUNTABEL MELALUI PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DAERAH, TRIMATRA PEMBANGUNAN DESA, DAN PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI									
SASARAN RPJMD SERUYAN TAHUN 2025-2029	INDIKATOR POKOK RPJMD SERUYAN 2025-2029	BASELINE 2024	SATUAN	TARGET						CAPAIAN AKHIR 2030
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel.	Nilai SAKIP	71	Koefisien	72	73	74	75	76	77	77
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	2,5	Koefisien	2,6	3	3,5	4	4,5	5	5
MISI V	MEWUJUDKAN PENINGKATAN EKONOMI DAN DAYA SAING INVENTASI DAERAH BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DAN POTENSI UNGGULAN DAERAH									
TUJUAN	TERWUJUDNYA PENINGKATAN PAD DAN INVESTASI DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS RAKYAT DAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH									
SASARAN RPJMD SERUYAN TAHUN 2025-2029	INDIKATOR POKOK RPJMD SERUYAN 2025-2029	BASELINE 2024	SATUAN	TARGET						CAPAIAN AKHIR 2030
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	75.426.432.626	Rupiah	265.791.039.698	164.390.227.109	172.049.981.408	180.092.723.428	188.537.602.550	197.957.046.423	197.957.046.423

Tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi bapenda adalah ***Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*** dengan indikator kinerja ***Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)***

3.2 Sasaran

Sasaran pembangunan merupakan pencapaian konkret yang ingin direalisasikan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran harus disusun agar terukur, spesifik, realistis, dan dapat diwujudkan dalam periode lima tahun sehingga dapat menjadi indikator keberhasilan berbagai program perangkat daerah. Dengan demikian, perumusan tujuan dan sasaran yang tepat akan memastikan pembangunan Kabupaten Seruyan berjalan lebih terarah, sistematis, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Secara lebih detail, keterkaitan misi hingga sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 dijelaskan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

MISI RPJMD SERUYAN	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD
Misi 3: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa Dan Inovasi Layanan Publik	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Daerah, Kemandirian Desa, dan Pemerintahan yang demokratis, transparan, inovatif, kapabel dan akuntabel Melalui Pemerataan infrastruktur Daerah, Trimatra Pembangunan Desa, dan Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi	• Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel. • Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Misi 5: Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Dan Daya Saing Inventasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Potensi Unggulan Daerah	Terwujudnya Peningkatan PAD dan Investasi Daerah melalui pengembangan ekonomi berbasis rakyat dan sektor unggulan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Seruyan tahun 2025-2029,

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan menetapkan sasaran perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagaimana pada tabel 3.3 berikut :

Visi : Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, Dan Amanah Untuk Semua

Tabel 3. 3 Keterkaitan Visi, Misi dan Sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

MISI	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKTOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa Dan Inovasi Layanan Publik	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,52	7,25	4,66	4,67	4,69	4,99		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan Perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	62	64	66	68	70	70		
Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Dan Daya Saing Inventasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85,5	86	86,5	87	88	89		
			Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektifitas PAD	100	100	100	100	100	100		
			Peningkatan Objek Pajak (OP)	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0,24	1,09	2,33	2,34	2,38	2,39		

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan adalah sesuai dengan rumusan yang tertuang pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rumusan rencana program, kegiatan dan subkegiatan Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah sebagaimana Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3. 4 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bapenda Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKTOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
	o Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan Perangkat daerah	o Nilai Sakip Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	o Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	o Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

	- o Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah - o Peningkatan Objek Pajak (OP)	- o Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) - o Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			Penagihan Pajak Daerah	
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA KABUPATEN SERUYAN

Rencana Kerja merupakan rencana yang memuat Program, Kegiatan dan Sub kegiatan serta dana indikatif yang dibutuhkan guna mencapai sasaran.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub-kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas fungsi. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen atas kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pada Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2026 menetapkan 2 program, 9 kegiatan dan 54 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh sekeretariat dan bidang-bidang pada Bapenda Kabupaten Seruyan dengan total kebutuhan pagu indikatif sebesar **Rp.15.673.354.282,00**. Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda Kabupaten Seruyan Tahun 2026 serta pagu indikatif yang dibutuhkan adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						15.673.354.282,00							16.373.628.672,04	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						15.673.354.282,00							16.373.628.672,04	
	5.02	KEUANGAN						15.673.354.282,00							16.373.628.672,04	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-			100 Persen	12.011.397.582,00						-	12.548.058.334,50	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			20 Dokumen/ Laporan	63.538.000,00			-	-	-	-	66.376.832,94	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	18.578.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.408.051,91	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	7.220.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.542.584,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	7.220.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.542.584,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.835.094,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.410.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.651.714,98	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	7.260.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.584.371,67	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	10.350.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.812.430,68	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			40 Orang/Bulan	8.121.533.375,00			-	-	-	-	8.484.397.744,66	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	8.090.154.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.451.616.753,12	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	6.984.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.296.040,18	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.970.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.192.056,09	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan															
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	7.898.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.250.877,06	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Dokumen Laporan	5.465.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.709.172,34	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran															
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	6.062.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.332.845,87	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	16.712.000,00			-	-	-	-	17.458.680,35	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4.796.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.010.281,89	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	4.980.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.202.502,88	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.836.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.052.069,06	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.100.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.193.826,52	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	622.668.800,00			-	-	-	-	650.489.201,78	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	168.899.800,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		176.446.123,66	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	4.692.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.901.635,24	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	4.982.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.204.592,24	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	142.961.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		149.348.396,41	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	301.134.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		314.588.454,23	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	-			100 Persen	1.070.499.951,00			-	-	-	-	1.118.329.132,03	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	21.360.200,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.314.558,64	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	178.523.950,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		186.500.273,88	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	23.034.300,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.063.456,24	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	154.903.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		161.823.956,53	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	158.327.500,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		165.401.460,77	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	7.680.001,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.023.138,02	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	526.671.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		550.202.287,95	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Realisasi Pengadaan Barang terhadap RKBMd	-			100 Persen	721.641.000,00			-	-	-	-	753.883.409,71	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Jenis Unit	50.244.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		52.488.866,40	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	493.226.400,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		515.263.406,86	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	178.170.600,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		186.131.136,45	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiannya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	1.092.947.956,00			-	-	-	-	1.141.780.098,02	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Dokumen Laporan	15.015.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.685.859,59	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Jenis Laporan	257.074.668,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		268.560.582,43	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Dokumen Laporan	820.858.288,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		857.533.656,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiannya Pemeliharaan BMD Sesuai dengan RKPBMĐ Perangkat Daerah	-			100 Persen	301.856.500,00			-	-	-	-	315.343.235,01	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	187.830.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		196.222.111,61	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	53.250.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.629.172,35	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	60.776.500,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		63.491.951,05	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah 2.Cakupan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	-			100 Persen	3.661.956.700,00						-	3.825.570.337,54	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.Tersusunnya Dokumen pemcanaan dan pelayanan pendapatan daerah (4 dokumen) 2.Tersusunnya dokumen pengolahan data dan penetapan pajak daerah (4 Dokumen) 3. Tersusun dokumen penagihan dan penyelesaian perpajakan daerah (3 Dokumen) 4.Tersusunnya dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pendapatan daerah (3 Dokumen)	-			14 Dokumen	3.661.956.700,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbahan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Mendorong kemandiria n daerah melalui swa sembada pangan, air dan energi serta penin gkatan Pen dapatan Asli Daerah (PAD)	Wajib Pajak	-	3.825.570.337,54	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0001		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	365.524.500,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbahan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Mendorong kemandiria n daerah melalui swa sembada pangan, air dan energi serta penin gkatan Pen dapatan Asli Daerah (PAD)	Wajib Pajak		381.855.876,25	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0002		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	269.960.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Wajib Pajak		282.021.621,95	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>				1 Laporan	226.822.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Wajib Pajak		236.956.246,61	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>				1 Unit	277.181.500,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Wajib Pajak		289.565.773,47	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				1 Laporan	366.280.500,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Wajib Pajak		382.645.653,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	197.440.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Wajib Pajak		206.261.479,62	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)															
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				43000 Obyek Pajak	154.858.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Wajib Pajak		161.776.945,96	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	254.180.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Wajib Pajak		265.536.582,71	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah															

			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	249.033.500,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Wajib Pajak		260.160.140,73	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah															
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				9 Dokumen	243.903.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Wajib Pajak		254.800.414,61	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				300 Dokumen	265.592.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Wajib Pajak		277.458.462,80	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				50 Dokumen	255.813.700,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Wajib Pajak		267.243.275,27	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	205.268.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Wajib Pajak		214.439.229,13	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	300.100.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Wajib Pajak		313.508.255,84	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan, air dan energi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Wajib Pajak		31.340.378,79	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H						15.673.354.282,00							16.373.628.672,04	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) adalah suatu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan. Didalam Renja juga memuat rumusan indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan atau sub-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapenda. Dengan demikian selain menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Bapenda selama satu tahun kedepan.

Renja Bapenda Tahun 2026 ini selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para stakeholder maupun oleh seluruh staf Bapenda Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, Juli 2025
Kepala Badan Pendapatan
Daerah



SUKARDI, SE
Pembina Tk.I/IV/b
NIP. 19710603 200501 1 012